



panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

**Deputi
YANLIK**

FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP)

Peraturan Menteri PANRB No. 16 Tahun 2017

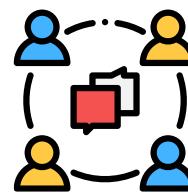
Asisten Deputi Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi



Tentang Pendoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik Di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan

“Forum Konsultasi Publik merupakan kegiatan dialog, diskusi pertukaran opini secara partisipatif antara penyelenggara layanan publik dengan publik untuk membahas antara lain: rancangan kebijakan, penerapan kebijakan, dampak kebijakan, evaluasi pelaksanaan kebijakan, ataupun permasalahan terkait pelayanan publik dalam kerangka transparansi dan efektivitas untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik”

Highlight Peraturan Menteri PANRB No.16 Tahun 2017 (Pasal 2)



Kewajiban melakukan FKP
sebagai bentuk peran serta
masyarakat dalam pelayanan publik



**Hasil dituangkan dalam bentuk
berita acara janji perbaikan
pelayanan publik**



**Laporan hasil penyelenggaraan FKP
disampaikan kepada Menteri
PANRB**

Pihak yang terlibat FKP

1

Penyelenggara Layanan



Unit yang
menyelenggarakan
layanan publik

2

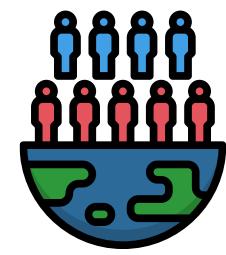
Pengguna Layanan



Masyarakat
yang
menggunakan
layanan pada
unit terkait

3

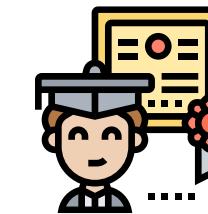
Stakeholder Pelayanan Publik



Pihak lain yang
berkaitan dengan
kegiatan
pelayanan pada
unit penyelenggara

4

Ahli/Praktisi



Individu atau
organisasi yang
merepresentasi
kan keahlian
yang berkaitan
dengan layanan
yang diberikan

5

Organisasi Masyarakat Sipil



Organisasi
masyarakat sipil
yang **bergerak**
sesuai pada isu
berkaitan dengan
layanan yang
diberikan

6

Media Massa



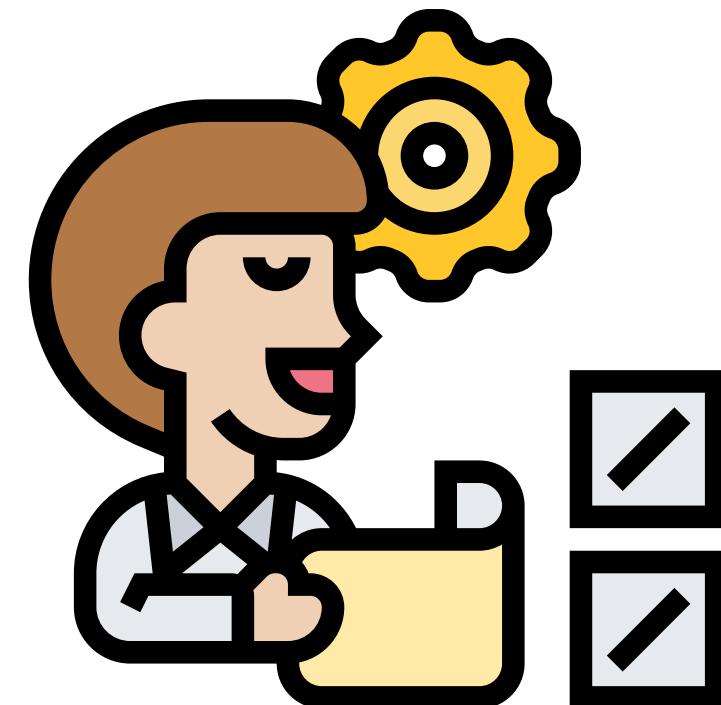
Media massa
sebagai bentuk
keterbukaan
informasi publik

Tahapan Pelaksanaan FKP



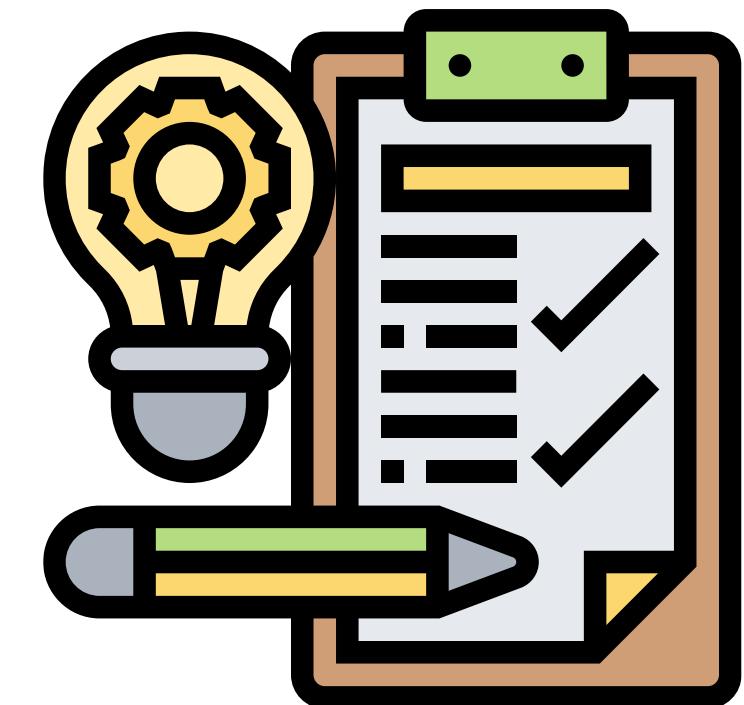
Pra Pelaksanaan

1. Penganggaran;
2. Pemilihan Topik; dan
3. Pemilihan *stakeholders* dan narasumber



Pelaksanaan

1. Diskusi Dialog Dua Arah;
2. Mufakat;
3. Penyusunan Berita Acara; dan
4. Dokumentasi Kegiatan



Pelaporan dan Tindak Lanjut

1. Menyusun Laporan Pelaksanaan FKP;
2. Mengirimkan Laporan kepada Kementerian PANRB;
3. Tindaklanjut Hasil FKP

Berita Acara

Berita acara berisi:

- Identifikasi masalah
- Usulan rekomendasi perbaikan
- Jangka waktu penyelesaian
- Tanda tangan pihak terkait
- No Kontak/HP, jenis kelamin, dan keterangan perwakilan yang menandatangani berita acara

FORMAT BERITA ACARA
PENYELENGGARAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK

PEMERINTAH KABUPATEN A
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jalan Damai Sejahtera No. 1 Kabupaten A

BERITA ACARA HASIL FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP)
SEKTOR PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN A

Pada hari ini, Kamis, 1 April 2022, telah dilaksanakan Forum Konsultasi Publik Sektor Pelayanan Administrasi Kependudukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten A. Berdasarkan hasil diskusi dan keputusan bersama menyatakan sebagai berikut:

NO	Identifikasi Masalah	Usulan Rekomendasi Perbaikan	Jangka Waktu Penyelesaian
1.			
2.			

Pimpinan Unit Penyelenggara Pelayanan dapat menerima identifikasi masalah, usulan rekomendasi, jangka waktu dan berkomitmen menindaklanjuti rekomendasi perbaikan tersebut sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.

Masyarakat dan *stakeholder* yang hadir akan melakukan pemantauan dan mengawasi progress tindak lanjut perbaikan yang dilakukan oleh Unit Penyelenggara Pelayanan sesuai usulan rekomendasi dan jangka waktu penyelesaian yang telah disepati bersama.



Demikian berita acara ini dibuat sebagaimana mestinya.

Kabupaten A, 1 April 2022

No.	NAMA	NO HP	JENIS KELAMIN (L/P)	PERWAKILAN	TANDA TANGAN*
1.					
2.					

*) Penandatangan adalah masing-masing perwakilan dari Peserta FKP dan wajib mencantumkan nomor kontak/HP

Jabatan*

Tanda Tangan
Nama Terang

Jabatan*

Tanda Tangan
Nama Terang

*) Penandatangan adalah Pimpinan Instansi dan Penyelenggara Pelayanan.

Usulan Rekomendasi Perbaikan di Berita Acara

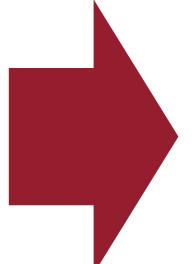
Tindak lanjut FKP

BERITA ACARA HASIL FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP)

SEKTOR PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN A

Pada hari ini, Kamis, 1 April 2022, telah dilaksanakan Forum Konsultasi Publik Sektor Pelayanan Administrasi Kependudukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten A. Berdasarkan hasil diskusi dan keputusan bersama menyatakan sebagai berikut:

NO	Identifikasi Masalah	Usulan Rekomendasi Perbaikan	Jangka Waktu Penyelesaian
1.			
2.			



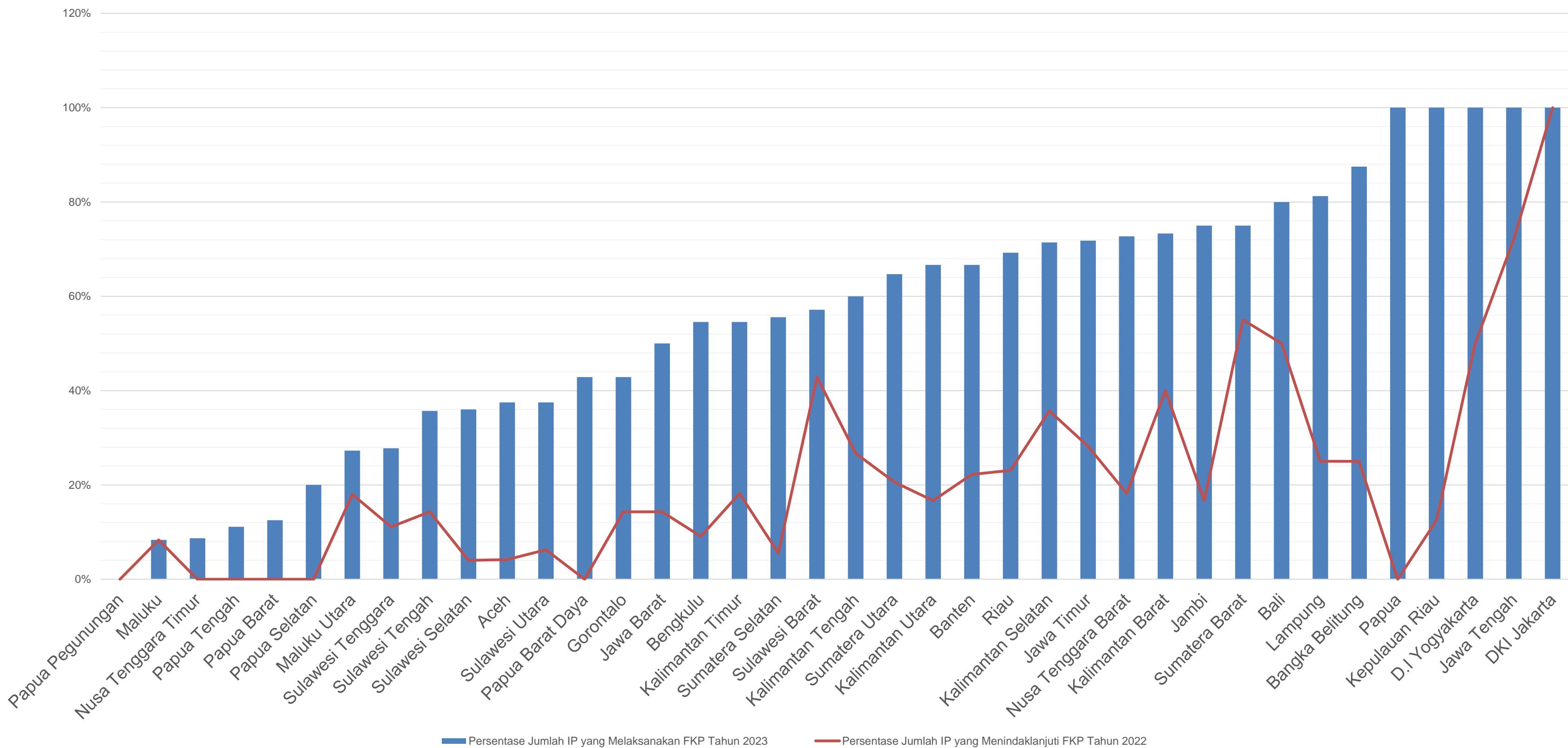
NO	IDENTIFIKASI MASALAH	REKOMENDASI DAN TARGET PENYELESAIAN	TINDAK LANJUT	PENJELASAN
1.	Sesuai dengan yang ada di Berita Acara	Sesuai dengan yang ada di Berita Acara	Bentuk Tindak Lanjut	
2.	Dan Seterusnya	Dan Seterusnya	Rencana Aksi/ Keterangan	

*Dilengkapi dengan bukti-bukti tindak lanjut

Catatan:

Bukti dukung tindak lanjut hasil FKP dapat berupa foto pelaksanaan tindak lanjut, surat dan lain sebagainya

Data Pelaksanaan FKP



Teknis Penyusunan Laporan Forum Konsultasi Publik



Skema Pelaporan Pelaksanaan dan Tindak Lanjut Forum Konsultasi Publik



 **panrb** KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

 **Deputi YANLIK**

Pelaporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) & Forum Konsultasi Publik (FKP)

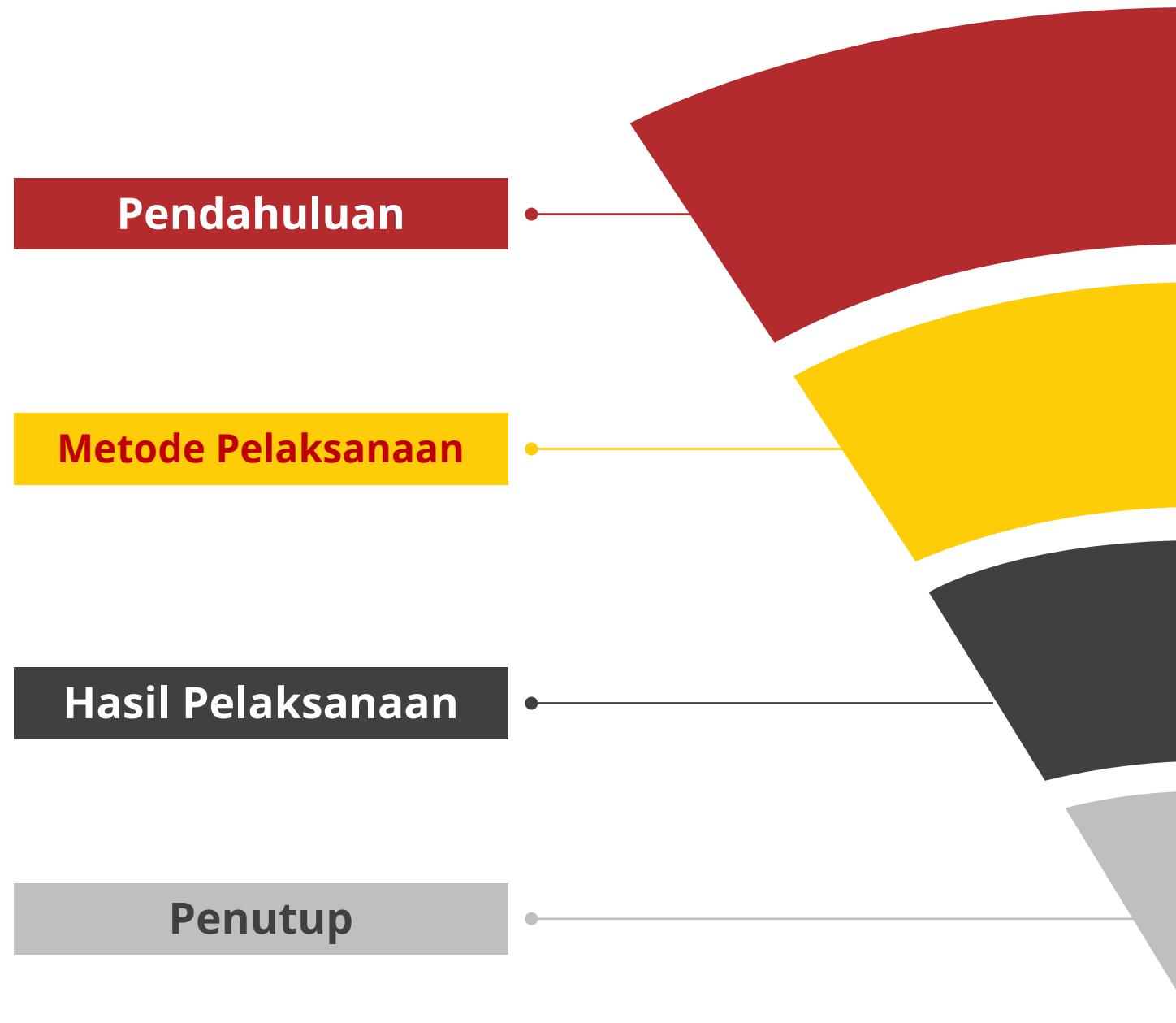
Selamat datang. Form ini dikelola oleh Asisten Deputi Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat, Deputi Bidang Pelayanan Publik, Keririrmenterian PANRB. Silahkan laporan Pelaksanaan SKM & FKP Anda.

Platform pelaporan ini hanya wajib diisi oleh bagian organisasi/biro organisasi/ortala masing-masing instansi atau daerah.

Terimakasih.

Deadline pengumpulan laporan pelaksanaan dan tindak lanjut FKP
30 November tahun berjalan
Melalui bit.ly/pelaporanskmfkp

Struktur Laporan Pelaksanaan FKP Unit Penyelenggara Pelayanan



FORMAT LAPORAN PENYELENGGARAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP)

HALAMAN SAMPUL

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
2. Tujuan dan Manfaat
3. Ruang Lingkup

B. METODOLOGI PELAKSANAAN FKP

1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan
2. Penyelenggara dan Peserta FKP
3. Metode Pelaksanaan FKP
4. Susunan Acara FKP

C. HASIL PELAKSANAAN FKP

1. Identifikasi Masalah
2. Analisis
3. Rencana Aksi

D. PENUTUP

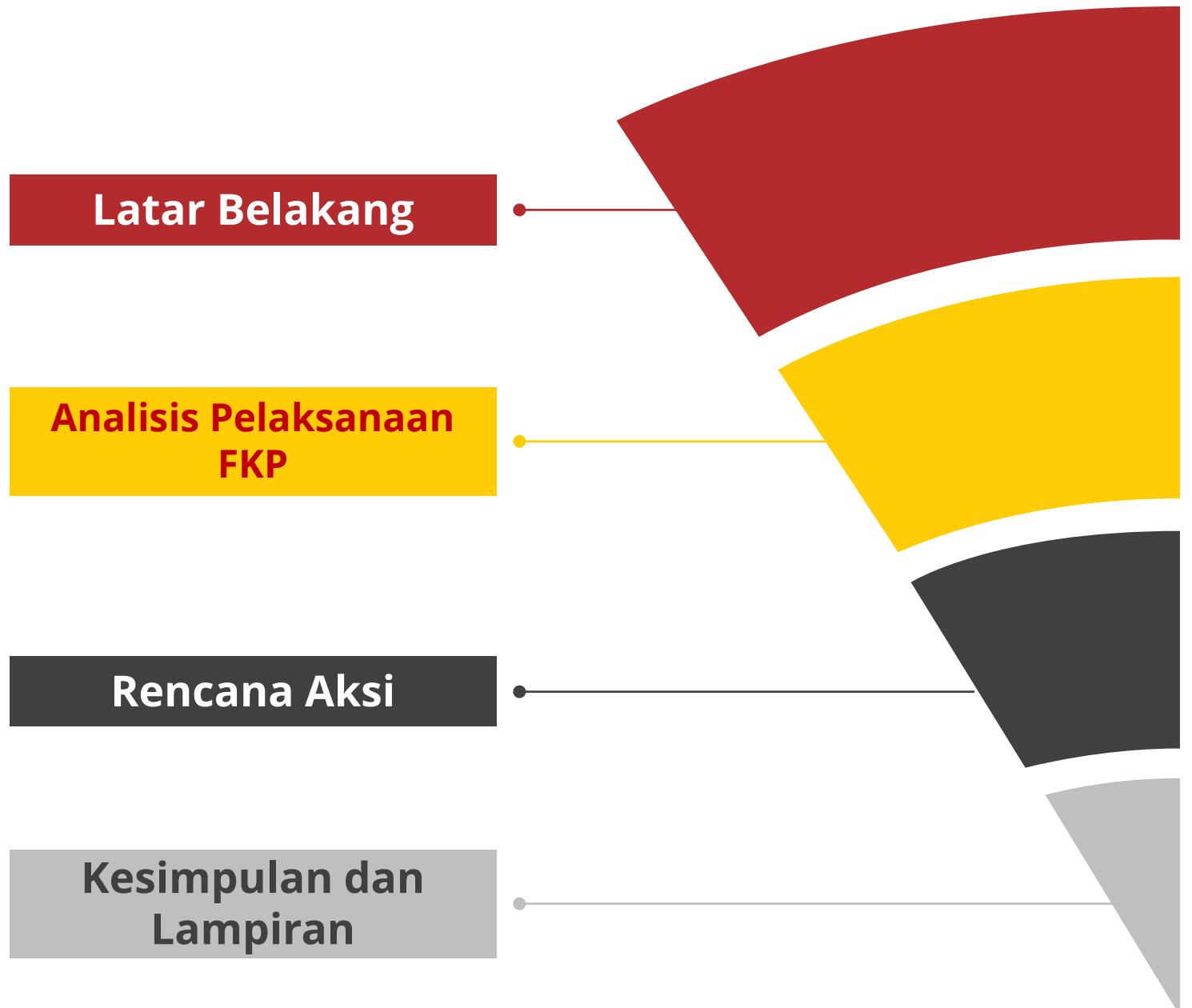
LAMPIRAN I Berita Acara Yang Ditandatangani

LAMPIRAN II Salinan Daftar Hadir

LAMPIRAN III Surat Undangan

LAMPIRAN IV Dokumentasi Kegiatan

LAMPIRAN V Hasil Tindak Lanjut FKP Tahun Sebelumnya



Struktur Laporan Pelaksanaan FKP Biro/Bagian Organisasi

Matriks Pelaporan FKP Oleh Biro/Bagian Organisasi

LAMPIRAN I Matriks Pelaksanaan FKP Tahun Berjalan

MATRIKS PELAKSANAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK TAHUN
PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG

1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

(link laporan FKP UPP)

No.	Sumber Input	Bentuk Penyelenggaraan (Daring/Luring/Hybrid)	Tema	Ruang Lingkup FKP	Waktu Pelaksanaan	Tim FKP	Pihak yang Terlibat	Hasil/Kesimpulan/Rekomendasi

LAMPIRAN II Matriks Hasil Tindak Lanjut FKP Tahun Sebelumnya

MATRIKS HASIL TINDAK LANJUT FORUM KONSULTASI PUBLIK TAHUN
PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG

NO	UNIT PENYELENGGARA PELAYANAN (UPP)	REKOMENDASI DAN TARGET PENYELESAIAN	REALISASI TINDAK LANJUT
1.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		Bentuk Tindak Lanjut
2.			Waktu Tindak Lanjut
2.	dan seterusnya		Bentuk Tindak Lanjut
3.			Waktu Tindak Lanjut
3.	dan seterusnya		Bentuk Tindak Lanjut
4.			Waktu Tindak Lanjut

ASISTEN DEPUTI

Pemberdayaan Partisipasi
Masyarakat

Catatan Utama Pelaksanaan dan Tindak Lanjut FKP

1 Ruang Lingkup FKP

Ruang lingkup pelaksanaan FKP tidak terbatas pada **pembuatan Standar Pelayanan**

2 Kelengkapan Laporan FKP

Laporan FKP harus terdiri dari **berita acara**, undangan, daftar hadir, dan dokumentasi pelaksanaan

3 Keterlibatan Aktor

Beberapa aktor yang dilibatkan dalam FKP menurut Permenpan 16 Tahun 2017 adalah Akademisi, OMS, Media Massa, Pengguna Layanan, Penyelenggara Layanan, Stakeholders Pelayanan Publik

4 Substansi Berita Acara

Berita acara FKP harus memuat identifikasi masalah, usulan rekomendasi perbaikan, jangka waktu penyelesaian perbaikan

5 Tindak Lanjut FKP

Rencana rekomendasi perbaikan yang telah disusun, **agar ditindaklanjuti dalam waktu yang ditentukan**. Laporan tindak lanjut FKP yang dikumpulkan tahun berjalan **merupakan hasil tindak lanjut tahun sebelumnya**

6 Kompilasi Laporan oleh Biro/Bagian Organisasi

Biro/Bagian Organisasi perlu untuk melakukan kompilasi laporan UPP yang dapat digunakan basis data untuk melakukan pembinaan serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan FKP

Terima Kasih

**Asisten Deputi Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi**

Materi:

bit.ly/MateriSKMdanFKP

Contact Person:

Help Desk Asdep PPM - **081119282666**

Media Sosial:

@pelayanan.publik